

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia menginginkan hidup dalam kondisi yang sempurna. Sempurna disini maksudnya adalah memiliki kondisi fisik maupun mental yang ideal dan berfungsi dengan baik. Kondisi diri yang ideal tersebut memungkinkan manusia dapat melakukan aktivitas dengan normal. Namun, tidak semua manusia terlahir dengan kondisi yang sempurna. Mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental akibat kecelakaan ataupun sejak lahir dapat disebut penyandang cacat. Keadaan fisik yang cacat seperti ini dapat menghambat kehidupan sehari-hari orang yang bersangkutan, karena tidak dapat melakukan aktivitas dengan selayaknya.

UU Nomor 4 Tahun 1997 menyebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.¹ Dalam hal ini, kata “cacat” yang berkonotasi kerusakan dan ketidaksempurnaan seperti nya kurang pantas untuk disematkan kepada manusia. Kata cacat lebih tepat untuk disematkan kepada benda, karena secara sosial kata cacat mendeskripsikan seseorang yang berada

¹ UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, <http://www.kpai.go.id/files/uu/UU-NOMOR-4-TAHUN-1997-TENTANG-PENYANDANG-CACAT.pdf> di Akses pada 10 Desember 2018 Pukul 09:28 WIB

dalam keadaan rusak dan tidak berguna karena dianggap tidak sempurna. Dengan demikian, kata ‘cacat’ dapat digantikan dengan kata disabilitas.

Negara-negara di dunia dalam Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) tahun 2007 di New York, Amerika Serikat, telah menyepakati bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Penekanan makna disabilitas dalam konsep ini adalah adanya gangguan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi di masyarakat.²

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tergolong signifikan. Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah: 11,580,117 orang dengan di antaranya 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang disabilitas mental) dan 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis).³ Berikut ini penulis sajikan data tersebut dalam bentuk tabel:

² BPS dukung Hak Penyandang Disabilitas, <https://bekasikota.bps.go.id/news/2015/06/25/20/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas.html> di Akses pada 19 September 2018 Pukul 19:47 WIB

³ Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf di Akses pada 18 Desember 2018 Pukul 14:33 WIB

Tabel I.1
Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia

No	Jenis Disabilitas	Jumlah (Jiwa)
1.	Penyandang Disabilitas Penglihatan	3,474,035
2.	Penyandang Disabilitas Fisik	3,010,830
3.	Penyandang Disabilitas Pendengaran	2,547,626
4.	Penyandang Disabilitas Mental	1,389,614
5.	Penyandang Disabilitas Kronis	1,158,012
Jumlah Total		11,580,117

Sumber: PUSDATIN Kementerian Sosial, 2010.

Badan Pusat Statistik juga menerbitkan Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada tahun 2016, yang mana survey tersebut dapat memperlihatkan gambaran kondisi penyandang disabilitas di Indonesia. Merujuk data Sakernas BPS tahun 2016, pravelensi penyandang disabilitas usia produktif (diatas 15 tahun) jumlahnya mencapai 22,9 juta jiwa atau 12,15 persen dari total penduduk usia produktif di Indonesia.⁴ Dari angka 12,15 persen penyandang disabilitas 45,74 persen tingkat pendidikan penyandang disabilitas tidak pernah atau tidak lulus SD, jauh dibandingkan non-penyandang disabilitas yang sebanyak 87,31 persen berpendidikan SD keatas.⁵

Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai kesamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya dalam menjalani kehidupan. Mereka berhak untuk hidup layak dan dihormati seperti orang yang normal. Namun pada kenyataannya keberadaan penyandang disabilitas masih terpinggirkan. Mereka cenderung dikasihani dan dianggap sebagai golongan yang

⁴ Memperjuangkan Hak Akses Pekerjaan Penyandang Disabilitas, <https://www.theindonesianinstitute.com/memperjuangkan-hak-akses-pekerjaan-penyandang-disabilitas/> di Akses pada 26 Desember 2018 Pukul 14:31 WIB

⁵ Indonesia Miliki 12 Persen Penyandang Disabilitas, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/oi9ruf384-indonesia-miliki-12-persen-penyandang-disabilitas>, di Akses pada 26 Desember 2018 Pukul 14:39 WIB

lemah oleh masyarakat. Perlakuan dari masyarakat yang tidak melibatkan mereka dalam aktivitas atau kegiatan kemasyarakatan menyebabkan mereka merasa minder, tidak percaya diri, tidak berguna, dan menutup diri dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas menjadi terisolir dan tidak mendapatkan akses informasi. Padahal sama seperti manusia pada umumnya, penyandang disabilitas juga ingin diakui dan dilibatkan dalam aktivitas kemasyarakatan untuk bersosialisasi.

Penyandang disabilitas juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Tidak sedikit perusahaan yang belum mampu untuk mengakomodir dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Rendahnya angka penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor formal dibuktikan dari hasil analisis yang dilakukan oleh LPEM Universitas Indonesia. Terdapat temuan yang cukup mencengangkan, dimana distribusi orang dengan disabilitas ringan yang bekerja di sektor formal hanya sekitar 35 persen dan orang dengan disabilitas berat distribusinya lebih rendah yaitu 24 persen dari total penyandang populasi penyandang disabilitas usia kerja.⁶

Penyandang disabilitas di Indonesia cenderung hidup dalam jurang kemiskinan dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah yang dialami oleh penyandang disabilitas salah satunya disebabkan karena stigma yang ada di masyarakat. Stigma berupa pelabelan negatif yang bersifat merendahkan penyandang disabilitas pada

⁶ Memperjuangkan Hak Akses Pekerjaan Penyandang Disabilitas, *loc. cit.*, <https://www.theindonesianinstitute.com/memperjuangkan-hak-akses-pekerjaan-penyandang-disabilitas/>

akhirnya menimbulkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas menyebabkan mereka mengalami pembatasan dan kehilangan hak aksesibilitas, kesejahteraan sosial, dan pendidikan.

Pembatasan yang dibuat oleh masyarakat tersebut membuat penyandang disabilitas menjadi tidak berdaya dan termarginalkan. Mereka kurang mendapat akses pendidikan dan modal karena keterbatasan fisik yang mereka miliki. Hal ini mengakibatkan sebagian besar penyandang disabilitas mengalami kemiskinan. Mereka termasuk dalam kategori yang paling miskin diantara yang miskin, karena dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Untuk itu, permasalahan kesejahteraan kaum disabilitas merupakan sesuatu yang harus ditangani secara serius.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, masyarakat penyandang disabilitas juga memiliki hak yang setara dengan warga Negara lainnya. Dalam hal ini, Pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat penyandang disabilitas. Dalam hal ini, Pemerintah selaku pemangku kebijakan telah membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi hak-hak kaum disabilitas tersebut.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya masih banyak poin-poin di dalam undang-undang tersebut yang masih belum dapat terealisasi sesuai harapan. Contohnya, pada Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, telah disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen dan perusahaan swasta paling sedikit 1 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Namun pada kenyataannya implementasi dari kebijakan tersebut masih jauh dari harapan, sebab masih banyak perusahaan, kantor-kantor pemerintahan, BUMN dan BUMD yang tidak merekrut penyandang disabilitas.

Masyarakat dan pihak swasta juga turut mempunyai peran atas kesejahteraan kaum penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seharusnya dapat berintegrasi didalam masyarakat sehingga mereka bisa berkontribusi baik dalam kegiatan kemasyarakatan maupun dalam bidang pekerjaan, agar para penyandang disabilitas tersebut dapat menunjukkan eksistensinya sebagai manusia. Integrasi penyandang disabilitas didalam masyarakat dan dunia pekerjaan dapat terwujud apabila pemberian stigma negatif terhadap kaum disabilitas dapat dihentikan.

Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas adalah stigma yang disematkan kepada diri mereka, sehingga menghambat mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan serta menghambat aktivitas sosial, dan ekonomi sehingga

mengurangi hak mereka. Tetapi, dengan jumlah yang begitu besar, keberadaan penyandang disabilitas di Indonesia merupakan sebuah potensi yang harus dimanfaatkan dengan baik. Hasil temuan International Labour Organization (ILO), menunjukkan jika penyandang disabilitas dilibatkan dalam proses pembangunan, maka berpotensi memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3 persen hingga 7 persen.⁷

Potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Potensi tersebut harus digali dan memerlukan usaha bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk dapat mewujudkannya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menggali potensi tersebut adalah dengan melakukan aktivitas sosial dan ekonomi yang melibatkan kaum penyandang disabilitas. Aktivitas sosial ekonomi kaum penyandang disabilitas tersebut, apabila dilakukan secara bersama-sama oleh pihak pemerintah, swasta dan masyarakat, dan dilakukan secara berkelanjutan maka niscaya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Aktivitas sosial-ekonomi yang melibatkan penyandang disabilitas pada hakikatnya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan mereka. Dalam hal ini, salah satu wujud dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup dari kaum penyandang disabilitas adalah dengan diselenggarakannya aktivitas sosial ekonomi melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh

⁷ Memperjuangkan Hak Akses Pekerjaan Penyandang Disabilitas, *loc. cit.*, <https://www.theindonesianinstitute.com/memperjuangkan-hak-akses-pekerjaan-penyandang-disabilitas/>

warga melalui proses kegiatan Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.⁸

Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas atau biasa disebut “Kubependa” adalah salah satu KUBE yang melakukan aktivitas sosial-ekonomi dengan melibatkan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, mayoritas penyandang disabilitas anggota Kubependa adalah tunadaksa. Kubependa ini dibentuk pada tahun 2007 atas inisiatif seorang penyandang disabilitas tunadaksa bernama Ibu Paini. Aktivitas ekonomi yang dilakukan kaum penyandang disabilitas tunadaksa di Kubependa adalah memproduksi dan menjual aneka makanan ringan seperti peyek, onde-onde, stik keju, stik bawang, dan singkong gadung. Selain memproduksi dan menjual makanan ringan, di Kubependa juga terdapat usaha menjahit pakaian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tunadaksa.

Keberadaan Kubependa di kota Bekasi ini juga telah banyak diketahui oleh masyarakat. Kubependa ini juga sering mendapatkan bantuan baik dari komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun perusahaan swasta. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas di Bekasi. Keberadaan Kubependa di Bekasi ini dapat menjadi contoh (*role mode*) bagi para penyandang disabilitas lainnya untuk mampu bangkit dan berkontribusi dalam masyarakat.

⁸ Hendra Wijayanto, 2015. *Pemberdayaan Difabel Dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar*, (IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration, Vol. 1, No. 2), hlm.141.

Pada penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai bentuk aktivitas sosial ekonomi apa saja yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas tunadaksa. Penulis juga akan mendeskripsikan faktor pendukung dan kendala yang dihadapi Kubependa dalam menjalankan aktivitas sosial ekonomi, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas sosial ekonomi di Kubependa tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas “Kubependa” merupakan sebuah unit usaha dan juga wadah bagi para penyandang disabilitas tunadaksa untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuan diri. Kubependa di Bekasi ini berdiri atas prakarsa dari kaum penyandang disabilitas itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemauan yang kuat untuk dapat hidup mandiri dan ikut serta berkontribusi bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah, masyarakat dan pihak swasta juga turut berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para penyandang disabilitas yang tergabung dalam Kubependa. Berdasarkan penjelasan masalah diatas, dapat dirumuskan tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bentuk aktivitas sosial-ekonomi apa saja yang dilakukan penyandang disabilitas tunadaksa di Kelompok Usaha Bersama Penyandang

Disabilitas (Kubependa) di Kampung Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi?

2. Faktor pendukung dan kendala apa yang dihadapi oleh Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas (Kubependa) di Kampung Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dalam menjalankan aktivitas sosial-ekonomi?
3. Dampak Sosial dan Ekonomi apa yang terjadi pada penyandang disabilitas tunadaksa di Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas (Kubependa) di Kampung Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk aktivitas sosial-ekonomi para penyandang disabilitas tunadaksa yang tergabung di dalam Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas di Kampung Bojong Menteng, Bekasi dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup. Oleh karena itu, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bentuk aktivitas sosial-ekonomi yang dilakukan penyandang disabilitas tunadaksa di Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas (Kubependa) di Kampung Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas sosial-ekonomi di Kelompok Usaha Bersama

Penyandang Disabilitas (Kubependa) di Kampung Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

3. Mendeskripsikan dampak sosial dan ekonomi yang terjadi pada penyandang disabilitas tunadaksa dalam aktivitas sosial-ekonomi di Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas (Kubependa) di Kampung Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara akademik dan manfaat secara praktis. Secara akademik, penelitian ini bermanfaat agar para pembaca dapat memahami aktivitas sosial-ekonomi para penyandang disabilitas tunadaksa di Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas (Kubependa) Bekasi. Penelitian ini juga diharapkan agar mampu berkontribusi dalam khazanah keilmuan sosiologi, khususnya mengenai aktivitas sosial-ekonomi yang dilakukan penyandang disabilitas tunadaksa.

Manfaat praktis dengan dilakukannya penelitian ini adalah penulis dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu dan teori-teori yang sudah penulis dapat selama berkuliah di Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta kedalam sebuah karya tulis, serta mendapatkan pengalaman baru. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi peneliti lain di kemudian hari yang ingin mengkaji mengenai aktivitas sosial-ekonomi penyandang disabilitas, khususnya tunadaksa.

I.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Tinjauan pustaka ini dilakukan dalam rangka memperjelas fokus penelitian dengan cara meninjau penelitian-penelitian sejenis yang berkaitan dengan topik yang penulis ingin teliti. Tinjauan pustaka bermanfaat untuk membantu penulis agar lebih fokus dalam memahami permasalahan. Selain itu tinjauan pustaka juga bermanfaat agar penulis lebih memahami tentang metode, landasan konsep atau teori, serta persamaan dan perbedaan diantara penelitian sejenis tersebut sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah penulis lakukan, kaum penyandang disabilitas merupakan golongan masyarakat yang mengalami marginalisasi dan cenderung hidup dalam garis kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial kaum penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan baik oleh pemerintah, LSM, komunitas masyarakat, dan bahkan pihak swasta dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup kaum penyandang disabilitas. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup kaum penyandang disabilitas tersebut dapat terwujud dengan cara mengembangkan potensi mereka agar menjadi mandiri dengan melibatkan mereka dalam aktivitas sosial ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah penulis lakukan, aktivitas sosial-ekonomi yang bertujuan untuk memandirikan dan meningkatkan kesejahteraan kaum penyandang disabilitas memiliki dampak positif dan dapat meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas dari segi sosial dan ekonomi.

Setidaknya, dengan dilibatkannya mereka dalam aktivitas sosial-ekonomi mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri secara mandiri. Selain itu, dengan dilibatkannya mereka dalam aktivitas sosial-ekonomi harkat dan martabat mereka sebagai manusia juga mulai bangkit. Agar dapat memahami penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, yang merupakan acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini, berikut ini adalah hasil tinjauan pustaka tersebut:

Pertama, jurnal karya Rima Setyaningsih dan Th. A. Gutama⁹, yang berjudul *Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukoharjo)*. Dalam jurnal ini, dilakukan penelitian terhadap salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang pemberdayaan penyandang disabilitas, yaitu Paguyuban Sehati yang terletak di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas di Sukoharjo dan untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Paguyuban Sehati terhadap para penyandang disabilitas di Sukoharjo.

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dalam menganalisis strategi dan kebijakan pengembangan kemandirian bagi penyandang disabilitas oleh Paguyuban Sehati. Dalam teori ini Parsons menjelaskan tentang empat fungsi imperatif dalam sebuah sistem yang menjadi satu kesatuan yang disebut dengan skema AGIL (*Adaptation,*

⁹ Rima Setyaningsih dan Gutama A, 2016. *Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukoharjo)*, (Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 31, No. 1), hlm.43.

Goal attainment, Integration, dan Latency). Parsons juga menjelaskan bahwa masyarakat adalah sebuah sistem sehingga dalam bermasyarakat harus ada empat fungsi AGIL untuk tetap memposisikan masyarakat dalam keadaan stabil atau seimbang karena suatu sistem cenderung bergerak mempertahankan keteraturan¹⁰

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, permasalahan utama yang dihadapi para penyandang disabilitas adalah persepsi masyarakat tentang mereka yang bernada meremehkan. Masyarakat menganggap penyandang disabilitas sebagai orang-orang lemah karena keterbatasan fisiknya. Hal ini menyebabkan mereka terpinggirkan karena banyak peran yang tidak dipercayakan kepada kaum disabilitas. Hal ini juga menyebabkan akses mereka terhadap lapangan pekerjaan menjadi sangat minim, karena para pemilik modal tidak ingin kaum disabilitas menjadi karyawan mereka. Selain itu, para penyandang disabilitas juga jarang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi pada forum-forum resmi yang mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan, sehingga banyak program dan kebijakan yang kurang memerhatikan hak-hak penyandang disabilitas.

Salah satu strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Paguyuban Sehati terhadap para penyandang disabilitas di Sukoharjo adalah dengan menggunakan pendekatan AGIL melalui program-program yang melibatkan antara masyarakat dan penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, analisis AGIL menyangkut empat sub sistem yang saling berkaitan dan wajib untuk dipenuhi agar tercipta keteraturan dalam masyarakat. Sub sistem pertama adalah sub sistem organis perilaku yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Terdapat dua jenis

¹⁰ *Ibid.*

kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan materi dan non-materi. Kebutuhan materi didominasi oleh sisi ekonomi yang berfokus pada peran kaum disabilitas dalam menghidupi dirinya sendiri.

Para penyandang disabilitas mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan pekerjaan untuk dapat menghasilkan uang. Sementara itu, sisi non-materi yang harus dipenuhi adalah pengakuan dan keadilan. Selama ini masyarakat memberikan stereotip negatif terhadap kaum disabilitas sehingga mereka mengalami marginalisasi. Hal ini menyebabkan timbulnya jurang pemisah yang menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Untuk memenuhi dua kebutuhan tersebut, Paguyuban Sehati berperan untuk menyerap aspirasi kebutuhan penyandang disabilitas maupun masyarakat agar dapat tercipta hubungan timbal balik yang seimbang antara kedua belah pihak. Selain itu juga dilakukan berbagai kegiatan agar para penyandang disabilitas dapat hidup dengan normal dan berdampingan dengan masyarakat.

Sub sistem kedua adalah kepribadian, yang dalam konteks ini berkaitan dengan motivasi untuk mencapai tujuan para penyandang disabilitas dan Paguyuban Sehati, yaitu mencapai kemandirian. Dalam hal ini, penyandang disabilitas menjadi aktor pasif yang menerima pengaruh dari berbagai kegiatan yang diadakan oleh Paguyuban. Para penyandang disabilitas diarahkan untuk mengikuti kebijakan-kebijakan agar dapat bertindak selaras dengan nilai dan norma yang telah dibudayakan oleh Paguyuban Sehati dalam rangka mencapai tujuan yaitu memandirikan kaum penyandang disabilitas yang rentan pada kehidupan sosial maupun ekonominya.

Sub sistem ketiga adalah sub sistem sosial yang memiliki fungsi integrasi. Fungsi integrasi inilah yang mengontrol seluruh sub-sub sistem agar berjalan selaras tanpa ada satupun yang tidak dipenuhi. Dalam hal ini, Paguyuban Sehati mengupayakan sosialisasi kepada para penyandang disabilitas agar bisa menjalani hidup sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dan diharapkan oleh masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh pengurus Paguyuban, Pemerintah, dan mitra organisasi yang hasilnya sukses melembagakan nilai dan norma yang benar kepada para penyandang disabilitas. Dengan adanya kegiatan ini Paguyuban Sehati telah berhasil menetralsisir gejolak yang timbul akibat dari stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas serta memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyandang disabilitas begitupun sebaliknya.

Sub sistem terakhir adalah sub sistem kultural atau budaya. Sub sistem budaya yaitu sub sistem yang membentuk tindakan dari manusia sesuai dengan nilai dan norma yang dianut dalam masing-masing budaya. Dalam hal ini, Paguyuban Sehati menginternalisasikan budaya yang didalamnya mengandung nilai-nilai dan aturan yang seharusnya serta tidak seharusnya dilakukan oleh penyandang disabilitas di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Internalisasi dilakukan melalui kegiatan pendidikan (sanggar inklusi), *character building* (sesuai nilai agama masing-masing) dan *peer* konseling (keluarga) dalam rangka mengendalikan kepribadian penyandang disabilitas.¹¹

¹¹ *Ibid.*

Kesimpulan dari penelitian ini adalah para penyandang disabilitas yang aktif dalam aktivitas sosial-ekonomi Paguyuban mulai dari *character building*, bidang ekonomi, sosialisasi hingga partisipasi sosial memiliki peningkatan yang signifikan dalam bidang-bidang tersebut. Peningkatan-peningkatan dari segi psikologi, ekonomi hingga sosial bermasyarakat menjadi dampak positif yang diterima oleh para penyandang disabilitas anggota binaan Paguyuban Sehati. Pemberdayaan yang dilakukan untuk memandirikan para penyandang disabilitas dapat dikatakan berhasil. Secara ekonomi para difabel juga mengalami peningkatan pendapatan bahkan beberapa penyandang disabilitas memiliki usaha baru dengan berwirausaha atau mendapatkan mata pencaharian baru. Beberapa penyandang disabilitas juga mulai dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Kedua, jurnal karya Rifqi Febrianto¹², yang berjudul *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tujuan dari didirikannya salah satu lembaga pemberdayaan khusus penyandang disabilitas di Jogjakarta, yaitu Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM). YPCM adalah sebuah unit usaha dibidang kerajinan kayu yang memberdayakan kaum penyandang disabilitas agar dapat berkarya. Hasil usaha dari kegiatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para penyandang disabilitas.

¹² Rifqi Febrianto, 2018. *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*, (Fakultas Psikologi: Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta)

Jurnal ini juga menjelaskan mengenai konsep pemberdayaan masyarakat. Menurut Payne, pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan non-material. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu individu untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri individu termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya.¹³

Jurnal ini menyebutkan bahwa lembaga pemberdayaan khusus untuk penyandang disabilitas sangat dibutuhkan oleh mereka yang memiliki kecacatan. Lembaga seperti ini sangat dibutuhkan untuk melatih keahlian para penyandang disabilitas agar mereka dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini menjadi penting karena berdasarkan hasil pendataan, jumlah penyandang disabilitas pada 9 provinsi di Indonesia sebanyak 299.203 jiwa, sekitar 67,33% disabilitas dewasa tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan. Sehingga mayoritas dari kaum penyandang disabilitas adalah pengangguran dan hidup dalam kemiskinan.

Joko Purwadi selaku Ketua dari YPCM mengatakan tujuan didirikannya Yayasan Penyandang Cacat Mandiri yaitu bisa meningkatkan taraf hidup dalam bidang sosial, ekonomi dan keagamaan. Namun, sebagai titik berat, karena di

¹³ *Ibid.*

yayasan ini mayoritas adalah penyandang disabilitas, maka kegiatan utama yang dilakukan adalah kegiatan yang dapat menutup kebutuhan sehari-hari para penyandang disabilitas. Seperti yang dikatakan Joko Purwadi, menurut Totok Mardikanto tujuan pemberdayaan masyarakat ada enam poin, yaitu:

Pertama, Perbaikan kelembagaan (*better institution*), dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kedua, Perbaikan usaha (*better business*), perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Ketiga, Perbaikan pendapatan (*better income*), dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

Keempat, Perbaikan lingkungan (*better environment*), perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Kelima, Perbaikan kehidupan (*better living*), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Keenam, Perbaikan masyarakat (*better community*), kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberdayaan yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti YPCM ini sangatlah dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas, selain digunakan untuk mencari kebutuhan materi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bisa juga sebagai motivasi bagi para penyandang disabilitas untuk tetap bersyukur hidup, bekerja keras, dan saling bersosialisai sesama orang lain. Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) ini membuat para penyandang disabilitas merasa sangat terbantu, individu bisa memiliki pekerjaan yang layak sesuai dengan keadaan individu, bisa kembali mencukupi kebutuhan sehari-hari individu, dan memiliki kegiatan positif yang bisa dilakukan bersama penyandang disabilitas yang lainnya di YPCM.

Ketiga, jurnal karya Hendra Wijayanto¹⁵, yang berjudul *Pemberdayaan Difabel Dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar*. Dalam tulisan ini dilakukan penelitian terhadap Kelompok Usaha Bersama di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis proses pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam memberdayakan penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial mereka, melihat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan KUBE, dan melihat dampak dari adanya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui KUBE. Pada tulisan ini digunakan teori aksi Talcott Parsons dan konsep pemberdayaan untuk melakukan analisis.

¹⁵ Hendra Wijayanto, *loc. cit.*

Teori aksi menjelaskan bahwa aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkan dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai suatu tujuan tersebut, aktor mempunyai kemampuan untuk memilih terhadap cara atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemampuan memilih inilah yang disebut Parsons sebagai *Voluntarism*. *Voluntarism* adalah kemampuan individu untuk menetapkan alat atau cara dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan.¹⁶ Penyandang disabilitas dalam konteks teori aksi ini dapat dipandang sebagai aktor yang memburu suatu tujuan, yaitu untuk memberdayakan diri mereka. Cara atau alat yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka demi menjadi berdaya diimplementasikan dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan

¹⁶ *Ibid.*

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁷

Jurnal ini juga menjelaskan mengenai konsep Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui: (a). Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok. (b). Peningkatan pendapatan. (c). Pengembangan usaha. (d). Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.¹⁸

Proses Pembentukan KUBE untuk sasaran PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya adalah (a). Pelatihan ketrampilan berusaha, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan ketrampilan PMKS serta kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasaran dan pengembangan hasil usahanya. (b). Pemberian bantuan stimulan sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan dengan keterampilan PMKS dan kondisi setempat. (c). Pendampingan, mempunyai peran sangat penting bagi keberhasilan KUBE. Pendampingan dilaksanakan oleh PSK

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

yang dibantu oleh infrastruktur kesejahteraan sosial di daerah seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS) dan Panitia Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial (WPUKS).¹⁹

Kelompok Usaha Bersama dibentuk untuk mengembangkan usaha kecil menengah guna membuka peluang/kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dalam hal ini para penyandang disabilitas. Proses pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar disesuaikan dengan jenis kecacatan dan derajat kecacatan para penyandang disabilitas. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar kepada para anggota KUBE adalah memasak bagi tuna daksa dan tuna rungu, menjahit bagi tunadaksa dan tunawicara, perbengkelan atau montir bagi tunadaksa dan tunawicara, Elektro atau Teknik Audio Video bagi tuna daksa dan tunarungu wicara, dan memijat bagi tunanetra.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan KUBE terletak pada peran pendamping, pemerintah, dan masyarakat. Pendamping memiliki tugas melakukan kajian dan verifikasi terhadap data-data penyandang disabilitas khususnya yang menjadi sasaran kegiatan. Pendamping juga bertugas untuk melakukan tes derajat kecacatan dengan bekerjasama dengan dokter ahli dari RSUD Kabupaten Karanganyar untuk mengetahui tingkat kecacatan penyandang disabilitas. Selain itu pendamping juga bertugas untuk memberikan pelatihan sesuai dengan jenis

¹⁹ *Ibid.*

kecacatan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan atau pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah memiliki peran dalam mendukung program pemberdayaan kaum disabilitas. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan mulai dari merehabilitasi, memberikan bantuan sosial kepada kaum disabilitas dan pemeliharaan kesejahteraan sosial dalam bentuk pemberian pelayanan yang bersifat terus menerus kepada mereka. Sementara itu, masyarakat memiliki peran dalam memberikan saran, memberikan masukan dan solusi kepada Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan supaya pemerintah lebih memperhatikan kaum disabilitas di daerahnya. Masyarakat juga perlu memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi kaum disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan KUBE terletak pada pola perilaku, masalah pekerjaan dan ekonomi, masalah sosial, dan masalah psikologis yang dialami oleh para penyandang disabilitas. Kecacatan merupakan penyebab timbulnya kesukaran untuk melakukan pekerjaan. Hal ini menimbulkan masalah sosial bagi para penyandang dengan timbulnya kegoncangan fungsional khususnya kepada seseorang penyandang disabilitas karena tidak dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai selaknya orang-orang. Hal ini akan menimbulkan masalah psikologis dan gangguan kejiwaan baru para penyandang disabilitas sehingga mengganggu mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Dampak dari adanya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui KUBE di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi

dampak psikologis, dampak aksesibilitas, dan dampak ekonomi. Pertama dampak psikologis, yaitu program Kelompok Usaha Bersama sangat membantu untuk memberikan semangat dan motivasi kepada difabel sehingga mereka tidak lagi merasa hina akan keberadaannya. Kedua dampak aksesibilitas, yaitu pemberian alat bantu untuk memudahkan difabel dalam hal mobilitas seperti kursi roda, tongkat tuna netra, dan kruk. Selain itu, juga dilakukan advokasi tentang aksesibilitas difabel tentang sarana umum yang kurang menunjang bagi difabel. Ketiga dampak ekonomi, yaitu pelatihan atau keterampilan tersebut banyak memberikan dampak positif bagi para difabel. Difabel lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan orang lain, sehingga difabel dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dirinya dan keluarganya.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah pemberdayaan kaum disabilitas melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas yang dilakukan melalui berbagai macam aktivitas. Kegiatan tersebut adalah training keterampilan dan kewirausahaan, serta pelatihan keterampilan menjahit yang diperuntukkan bagi penyandang tuna daksa dan tuna rungu wicara. Selain memberikan pelatihan dan pendampingan strategi, juga dengan memberikan modal dan peralatan bagi kaum disabilitas yang mahir dan ingin membuka usaha sendiri, sehingga mereka bisa hidup mandiri dari segi ekonomi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri maupun kebutuhan ekonomi keluarganya. Selain itu pemberdayaan ini juga mampu mengangkat moral para penyandang disabilitas maupun kemampuan sosial mereka yaitu kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya.

Keempat, Jurnal Internasional karangan Marko Buljevac, Zdravka Leutar, dan Marijana Majdak yang berjudul *The stigma of disability: Croatian experiences*.²⁰ Jurnal ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan agar dapat memahami pengalaman stigma disabilitas di Kroasia dari sudut pandang para penyandang disabilitas dan para profesional yang bekerja dengan mereka. Jurnal ini melihat tentang bagaimana para penyandang disabilitas memandang dan merasakan stigma terhadap diri mereka, jenis stigma apa saja yang mereka alami, dan bagaimana pandangan dari para profesional yang bekerja dengan para disabilitas memandang stigma disabilitas. Konsep yang digunakan dalam jurnal ini adalah konsep stigma. Disabilitas dapat dipahami sebagai tanda khusus yang mengarah pada segregasi dan menjadi dasar stigmatisasi. Stigma telah identik dengan kecacatan fisik dan karena itu membawa konotasi negatif, karena biasanya mengacu pada tanda fisik atau atribut yang dianggap tidak biasa.

Berdasarkan jurnal ini, stigma disabilitas dirasakan dalam banyak aspek kehidupan para penyandang disabilitas. Stigma disabilitas tersebut menentukan kehidupan mereka. Para informan penyandang disabilitas menunjukkan stigma disabilitas melalui hal-hal berikut: keterbatasan dalam membuat keputusan, disabilitas atau kecacatan sebagai identitas utama orang tersebut, tidak diharapkan oleh masyarakat, ketidakmungkinan untuk mengekspresikan diri, diskriminasi dalam pasar tenaga kerja, diskriminasi dalam pendidikan, eksklusi sosial dan marjinalisasi dalam aktivitas sehari-hari di masyarakat (isolasi sosial dan

²⁰ Marko Buljevac, Zdravka Leutar, dan Marijana Majdak, 2012. *The stigma of disability: Croatian experiences*, (*Disability & Rehabilitation* 34(9): 725–732)

kultural), dan keraguan terhadap para penyandang disabilitas dalam memilih pasangan dan kemampuan mereka dalam berkeluarga dan mengasuh anak.

Para informan profesional menunjukkan stigma kecacatan melalui hal-hal berikut ini: asexualitas yang diharapkan dari para penyandang cacat, istilah profesional yang menimbulkan prasangka, pengambilan keputusan orang tua tentang kehidupan anak-anak mereka dan harga yang lebih rendah untuk pekerjaan para penyandang cacat di pasar tenaga kerja. Para informan profesional dan informan disabilitas setuju dengan manifestasi stigma disabilitas yang sama yaitu: perlindungan berlebihan, Keputusan sepihak dari profesional tentang pendidikan anak-anak dengan disabilitas, pendidikan menuju pekerjaan yang tidak sejahtera, tidak menghargai kompetensi profesional penyandang disabilitas dan penolakan kemampuan untuk membentuk keluarga.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah stigma disabilitas tidak memungkinkan bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan hak-hak kemanusiaan dasar mereka yang dipromosikan oleh Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, yaitu: hidup mandiri dan diikutsertakan dalam masyarakat, penghormatan terhadap privasi, penghormatan terhadap rumah dan keluarga, pendidikan, pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, rekreasi dan olahraga. Mereka menjalani hidup dengan terstigmatisasi oleh lingkungan mereka. Seseorang tanpa disabilitas dapat menerima pendidikan formal, menikah, mencari pekerjaan, memenuhi kewajiban mereka dan membela hak-hak mereka.

Orang-orang tanpa cacat dapat hidup sebagai anggota masyarakat yang setara. Bagi para penyandang disabilitas, kemungkinan ini terbatas dan, terlebih lagi, mereka bahkan tidak ditawarkan. Penyandang disabilitas dipinggirkan, dibuat kekanak-kanakan dan kehilangan semua hak. Mereka senang jika mereka memiliki kesempatan untuk menggunakan hak yang memastikan keberadaan mereka, bahkan jika itu berarti hilangnya kapasitas profesional, martabat atau kebebasan.

Kelima, jurnal karangan Arni Surwanti²¹ yang membahas tentang pihak-pihak yang telah melakukan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas serta upaya-upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan. Jurnal ini juga meneliti permasalahan dan faktor yang mendukung kesuksesan implementasinya. Konsep yang digunakan dalam jurnal ini adalah konsep pemberdayaan ekonomi. Menurut Kassam, Sen dan Grown, dan Paul dalam Mardi Yatmo Hutomo, pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.²²

Program pemberdayaan ekonomi pada saat ini telah dilakukan oleh pemerintah, dan swasta baik itu melalui program *Corporate Sosial Responsibility* maupun oleh organisasi penyandang disabilitas di daerah, nasional yang didukung

²¹ Arni Surwanti, 2014. *Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Jurnal Manajemen & Bisnis Vol.5 No.1)

²² *Ibid.*

oleh organisasi non pemerintah tingkat nasional dan internasional juga organisasi lain yang bekerja di bidang disabilitas. Pada tingkat pemerintah, pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan dengan lintas sektor. Terdapat beberapa kementerian yang melakukan pemberdayaan diantaranya adalah Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti berbagai pelatihan ketrampilan dan bantuan modal.

Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh swasta dilaksanakan melalui program *corporate sosial responsibility / CSR*. Program yang ditawarkan kebanyakan adalah program penyediaan pendanaan usaha. Beberapa perusahaan juga telah menunjukkan keterlibatan memberikan pemberdayaan melalui program magang dan konsultatif.²³ Sementara pada organisasi penyandang disabilitas baik pada tingkat daerah atau nasional, yang didukung oleh pemerintah ataupun organisasi non pemerintah tingkat nasional maupun internasional juga aktif melakukan pemberdayaan kepada para penyandang disabilitas. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui program advokasi, pelatihan, pemberian modal, pendampingan.

Permasalahan dalam pengimplementasian berbagai upaya pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak tersebut antara lain adalah pengimplementasian peraturan perundang-undangan terkait pemberdayaan penyandang disabilitas yang belum efektif. Selain itu juga terdapat permasalahan

²³ *Ibid.*

pada pemberdayaan yang dilakukan didalam panti dan diluar panti. Permasalahan pemberdayaan didalam panti dan diluar panti tersebut pada umumnya terkait masalah tentang data tentang disabilitas yang tidak akurat, fasilitas yang kurang memadai, keterbatasan anggaran, dan keberagaman kondisi penyandang disabilitas.

Faktor pendukung dalam pengimplementasian pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas terbagi menjadi tujuh faktor. Faktor-faktor tersebut adalah (1) adanya motivasi dari penyandang disabilitas, (2) adanya dukungan dari keluarga, (3) adanya kesesuaian antara minat dan kapasitas yang dimiliki dalam pemilihan bidang yang ditempuh, (4) Adanya peralatan dan modal, (5) Adanya pendampingan baik pada pemasaran dan pengembangan produk, (6) Adanya jaringan kerja yang mendukung dalam masyarakat, dan (7) Lembaga Pendampingan Pengembangan Karier pada penyandang disabilitas yang masuk ke pasar tenaga kerja.²⁴

Kesimpulan pada jurnal ini adalah implementasi pemberdayaan kepada penyandang disabilitas di Indonesia, dilaksanakan baik oleh pemerintah, swasta, dan organisasi penyandang disabilitas baik yang didukung oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Implementasi pemberdayaan masih banyak menjumpai persoalan yang memerlukan adanya pembenahan di berbagai sisi. Suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat tercapai apabila beberapa hambatan yang sudah dijelaskan diatas dapat diatasi dan faktor-faktor pendukung dapat dioptimalkan.

²⁴ *Ibid.*

Keenam, jurnal karangan Ni Nyoman Mika Putri Karuniasih, dkk²⁵ yang membahas tentang pengalaman stigma yang dialami oleh remaja penyandang tunarungu di Bali. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep stigma yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Stigma adalah cap atau persepsi negatif terhadap seseorang oleh orang lain. Konsep stigma dikemukakan oleh Goffman mengarah pada orang-orang yang memiliki cacat sehingga tidak memperoleh penerimaan sosial sepenuhnya. Mereka merupakan orang yang direndahkan (*discredit stigma*) dan berpotensi dapat direndahkan (*discreditable stigma*).²⁶

Penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecacatan fisik umumnya akan mengalami stigmatisasi berupa pelabelan negative terhadap dirinya. Penyandang tunarungu di Bali diberi sebutan “bongol” serta penyandang tunawicara diberi sebutan “kolok”. Dalam hal ini sebutan “bongol” dan “kolok” memiliki makna yang mendiskreditkan, yaitu orang yang memiliki kecerdasan yang kurang. Pelabelan atau stigmatisasi ini akan berdampak pada kondisi mental dan perasaan dari remaja penyandang tunarungu tersebut serta berpotensi menyulut tindakan yang diskriminatif.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah stigmatisasi sosial berupa pelabelan negatif terhadap penyandang tunarungu merupakan hal yang sudah terkonstruksi secara mendasar menjadi sebuah persepsi yang dijadikan bahan untuk menilai keberadaan penyandang tunarungu. Hal ini berdampak pada pembentukan

²⁵ Ni Nyoman Mika Putri Karuniasih, Wahyu Budi Nugroho, Gede Kamajaya, 2017. *Tinjauan Fenomenologi Atas Stigmatisasi Sosial Penyandang Disabilitas Tunarungu*, (JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI (SOROT), [S.l.], v. 1, n. 1)

²⁶ *Ibid.*

karakter remaja penyandang tunarungu tersebut menjadi pribadi yang sensitif, pemalu, dan tidak percaya diri. Hal ini akan menghambat mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dengan begitu, stigmatisasi atau pelabelan terhadap penyandang tunarungu secara tidak langsung akan menimbulkan segregasi terhadap penyandang tunarungu.

Ketujuh, jurnal internasional karangan Stephenie R. Chaudoir, Valerie A. Earnshaw dan Stephanie Andel²⁷ yang membahas tentang bagaimana perbedaan pengalaman stigma antara “the discredited” yang stigmanya dapat terlihat dan “the discreditable” yang stigmanya dapat disembunyikan. Perbedaan pengalaman kedua stigma tersebut akan berpengaruh pada kesehatan psikologis dan fisik dari penyandang masing-masing stigma. Penelitian ini menggunakan konsep stigma dari Erving Goffman. Dalam konsep stigma ini, Erving Goffman membedakan antara orang yang didiskreditkan dan yang dapat didiskreditkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketersembunyian stigma akan memengaruhi kesehatan psikologis dan fisik dari individu yang memiliki stigma. Pengaruh stigma terhadap kondisi individu tersebut terjadi melalui sebuah mekanisme. Mekanisme stigmatisasi ini dimulai dari adanya stigma publik. Stigma publik tersebut berupa respon negatif masyarakat terhadap atribut yang terstigma. Publik stigma tersebut dimanifestasikan melalui serangkaian mekanisme stigma yang dapat terjadi pada tingkat individu, interpersonal, dan sosial budaya.

²⁷ Stephenie R. Chaudoir, Valerie A. Earnshaw dan Stephanie Andel, 2013. “*Discredited*” Versus “*Discreditable*”: Understanding How Shared and Unique Stigma Mechanism Affect Psychological and Physical Health Disparities, (BASIC AND APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY, 35:75–87)

Kesimpulan dari penelitian ini adalah individu dengan stigma yang tersembunyi (*the discreditable*) lebih rentan mengalami tekanan dan stress pada diri mereka dibandingkan mereka yang stigmanya dapat terlihat (*the discredited*). Tekanan dan stress tersebut terjadi karena orang yang stigmanya tidak terlihat sibuk untuk menutupi stigmanya tersebut agar tidak ketahuan orang lain. Kondisi stress dan tertekan ini juga mengakibatkan kondisi fisik individu dengan stigma yang tersembunyi ini menjadi lemah.

Studi ini yang berjudul *Aktivitas Sosial - Ekonomi Pada Kaum Penyandang Disabilitas Tunadaksa (Studi pada Penyandang Disabilitas Tunadaksa di Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas di Kampung Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi)*, fokus untuk menganalisis bentuk aktivitas sosial-ekonomi yang dilakukan kaum disabilitas tunadaksa yang tergabung di Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas serta faktor pendukung dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini juga fokus dalam menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas sosial-ekonomi tersebut.

Aktivitas sosial-ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah aktivitas sosial-ekonomi kaum yang termarginalkan dilakukan dengan mengembangkan kemampuan dan menggali potensi yang ada pada diri mereka, sehingga memiliki keterampilan. Perbedaan pada penelitian ini adalah melihat faktor pendukung dan kendala serta dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas sosial-ekonomi di Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas Bekasi. Penulis menggunakan tabel sebagai

berikut ini untuk memudahkan dalam membandingkan tinjauan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan topik yang akan penulis bahas:

Tabel I.2
Perbandingan Penelitian Sejenis

No	Nama/Judul	Teori/Konsep	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Marko Buljevac, Zdravka Leutar, dan Marijana Majdak / 2012 Jurnal Internasional, Disability & Rehabilitation, <i>The Stigma of Disability: Croatian Experiences</i>	Stigma	Penelitian Kualitatif	Mengkaji tentang penyandang disabilitas	Fokus tentang stigma yang dialami para penyandang disabilitas dalam kehidupan Sedangkan penelitian ini melihat bagaimana dampak aktivitas sosial-ekonomi penyandang disabilitas dalam menanggulangi stigma
2.	Stephenie R. Chaudoir, Valerie A. Earnshaw dan Stephanie Andel / 2013 Jurnal Internasional, Basic and Applied Social Psychology, <i>"Discredited" Versus "Discreditable": Understanding How Shared and Unique Stigma Mechanism Affect</i>	Stigma	Penelitian Kualitatif	Mendeskripsikan konsekuensi penyandang disabilitas fisik sebagai <i>"the discredited"</i>	Fokus tentang mekanisme stigma yang terjadi pada individu yang terstigma Sedangkan penelitian ini melihat bagaimana dampak aktivitas sosial-ekonomi yang dilakukan penyandang disabilitas

No	Nama/Judul	Teori/Konsep	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Psychological and Physical Health Disparities</i>				dalam menanggulangi stigma disabilitas
3.	Rima Setyaningsih dan Th. A. Gutama / 2016 Jurnal Nasional, Jurnal Sosiologi DILEMA, <i>Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukoharjo)</i>	Fungsionalisme Struktural oleh Talcott Parsons	Penelitian Kualitatif	Mengkaji tentang aktivitas sosial-ekonomi kaum disabilitas	Penelitian ini fokus membahas tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh Paguyuban Sehati Sedangkan penelitian ini melihat bentuk aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan penyandang disabilitas dan dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan
4.	Rifqi Febrianto / 2018 Jurnal Nasional, Fakultas Psikologi: Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, <i>Pemberdayaan Penyandang Disabilitas</i>	Pemberdayaan Masyarakat	Penelitian Kualitatif	Mengkaji tentang aktivitas sosial-ekonomi kaum disabilitas	Membahas tentang tujuan didirikannya Yayasan Penyandang Cacat Mandiri dan kegiatan pemberdayaan Sedangkan penelitian ini melihat dampak sosial dan ekonomi dari

No	Nama/Judul	Teori/Konsep	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					aktivitas sosial-ekonomi penyandang disabilitas tunadaksa
5.	Hendra Wijayanto / 2015 Jurnal Nasional, IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration, Pemberdayaan Difabel Dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar	Teori Aksi Talcott Parsons dan Pemberdayaan	Penelitian Kualitatif	Mengkaji tentang aktivitas sosial-ekonomi kaum disabilitas dan dampak dari aktivitas sosial-ekonomi tersebut. Serta membahas KUBE	Fokus kepada pemberdayaan disabilitas melalui program KUBE Sedangkan penelitian ini tidak terpaku pada program KUBE semata, tetapi aktivitas sosial-ekonomi dapat dilakukan bersama Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Kubependa
6.	Arni Surwanti / 2014 Jurnal Nasional, Jurnal Manajemen & Bisnis, Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia	Pemberdayaan Ekonomi	Penelitian Kualitatif	Mengkaji tentang penyandang disabilitas	Mengkaji tentang pihak-pihak yang melakukan pemberdayaan Sedangkan penelitian ini fokus pada bentuk aktivitas sosial-ekonomi yang dilakukan kaum disabilitas serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan
7.	Ni Nyoman Mika Putri Karuniasih, Wahyu Budi	Stigma	Penelitian Kualitatif	Mengkaji stigma sosial yang dialami	Fokus tentang stigma yang dialami para

No	Nama/Judul	Teori/Konsep	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p>Nugroho, Gede Kamajaya / 2017</p> <p>Jurnal Nasional, Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT), Tinjauan Fenomenologi Atas Stigmatisasi Sosial Penyandang Disabilitas Tunarungu</p>			penyandang disabilitas	<p>penyandang disabilitas tunarungu</p> <p>Sedangkan penelitian ini melihat bagaimana dampak aktivitas sosial-ekonomi penyandang disabilitas dalam menanggulangi stigma disabilitas</p>
8.	<p>Rhesa Yusuf Prabowo / 2019</p> <p>Aktivitas Sosial-Ekonomi Pada Kaum Penyandang Disabilitas Tunadaksa (Studi pada Penyandang Disabilitas Tunadaksa di Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas di Kampung Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi)</p>	Aktivitas Sosial-Ekonomi dan Stigma	Penelitian Kualitatif	Membahas mengenai aktivitas sosial-ekonomi penyandang disabilitas tunadaksa	Mengkaji dampak sosial-ekonomi dari aktivitas sosial-ekonomi yang dilakukan kaum disabilitas tunadaksa di Kubependa

Sumber: Diolah Berdasarkan Penelitian Sejenis, 2019.

I.6 Kerangka Konseptual

I.6.1 Aktivitas Sosial-Ekonomi

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan berbagai aktivitas yang didalamnya selalu melibatkan proses interaksi antar individu di masyarakat. Aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun nonfisik, merupakan suatu aktivitas.²⁸ Sosial berarti kemasyarakatan, dalam hal ini, aktivitas sosial yang penulis maksud adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat yang didalamnya terdapat proses interaksi, baik antar individu maupun antar kelompok.

Fenomena ekonomi adalah gejala dari cara bagaimana orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka. Cara yang dimaksud disini adalah semua aktivitas orang dan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi jasa-jasa dan barang-barang langka.²⁹ Dalam hal ini, Aktivitas sosial ekonomi dapat diartikan sebagai: 1) kehendak, perilaku, tindakan dan tujuan yang tersosialisasi, 2) suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia, 3) berfungsinya suatu organisme, 4) suatu

²⁸ Anton M Mulyono, 2001. *Aktivitas Belajar*, (Bandung: Yrama), hlm. 26.

²⁹ Damsar dan Indrayani, 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 17.

tanggapan yang terorganisir.³⁰ Oleh karena itu, aktivitas sosial ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan perekonomian.

I.6.2 Penyandang Disabilitas Tunadaksa

Penyandang disabilitas merupakan sebuah istilah yang digunakan yang merujuk pada seseorang yang mempunyai kelainan fisik atau mental. Penyandang Disabilitas merupakan istilah alternatif yang sengaja diciptakan sebagai upaya untuk melawan diskriminasi terhadap kaum berkebutuhan khusus. Istilah yang pada akhirnya menjadi pilihan bahasa undang-undang ini adalah istilah paling baru dan diciptakan sesudah tahun 2009.³¹ Istilah ini sering digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat. Penggantian istilah ini ditujukan untuk memmanusiakan dan lebih menghormati kaum berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan keterangan Tarsidi yang juga selaras dengan sumber lain, yang menyebutkan bahwa istilah ‘penyandang disabilitas’ lahir dari sebuah “Diskusi Pakar Untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat” yang juga diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 19 – 20 Maret 2010 di Jakarta.³²

Pengertian penyandang disabilitas termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-Undang ini dibuat untuk mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan kaum

³⁰ G. Kartasapoetra dan Hartini, 2007. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 6.

³¹ Arif Maftuhin, 2016. *Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas*, (INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 3, No. 2) hlm. 151.

³² *Ibid.*

berkebutuhan khusus. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³³

Pengertian disabilitas sendiri menurut WHO adalah terbatasnya atau kurangnya (yang disebabkan oleh kekurangsempurnaan fisik) kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam cara yang dikategorikan normal untuk manusia.³⁴ Pengertian disabilitas menurut *Disabled People's International* (DPI) adalah hilangnya atau terbatasnya kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal didalam masyarakat dan tingkat yang sama dengan yang lain dikarenakan halangan fisik dan sosial.³⁵ Dalam hal ini, salah satu jenis disabilitas pada kategori penyandang disabilitas fisik adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh.³⁶

Penyandang disabilitas dalam perspektif sosiologis merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat. Penyandang disabilitas sering dianggap berbeda, kurang beruntung, tidak berhasil atau kurang berharga sebagai pasangan, orang

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

³⁴ Kusuma & Napsiyah, 2007. *Disabilitas Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PIC UIN Jakarta), hlm.21.

³⁵ *Ibid*, hlm.105.

³⁶ Dinie Ratri Desiningrum, 2016. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Psikosain), hlm. 92.

tua, teman, atau karyawan.³⁷ Sebagai kelompok minoritas, penyandang disabilitas mengalami stigmatisasi, pemisahan, dan marginalisasi. Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas yang menyebabkan mereka dianggap berbeda oleh masyarakat mengakibatkan timbulnya sikap-sikap prasangka dan perilaku diskriminasi yang mengarah pada stigmatisasi sebagai konsekuensi dari perbandingan sosial. Perbandingan sosial yang dimaksud adalah dengan membanding-bandingkan kemampuan penyandang disabilitas dengan kemampuan masyarakat mayoritas yang non-disabilitas.

I.6.3 Stigma dan Diskriminasi

Stigma merupakan istilah yang merujuk pada tanda-tanda pada tubuh yang dirancang untuk mengekspos sesuatu yang tidak biasa yang merupakan penanda status moral yang buruk. Tanda-tanda tersebut dipotong atau dibakarkan kedalam tubuh dan menunjukkan bahwa pembawa tanda itu adalah seorang budak, penjahat, atau pengkhianat - orang cacat, yang tercemar secara ritual, untuk dihindari terutama di tempat-tempat umum.³⁸

Menurut Erving Goffman, terdapat tiga tipe stigma yang diberikan kepada individu, yaitu³⁹:

1. Stigma yang berhubungan dengan kecacatan pada fisik seseorang
2. Stigma yang berhubungan dengan kecacatan pada mental atau karakter seseorang

³⁷ Marko Buljevac, Zdravka Leutar, dan Marijana Majdak, *loc. cit.*

³⁸ Erving Goffman, 1963. *Stigma*, (London: Penguin), hlm. 11.

³⁹ *Ibid*, hlm. 13.

3. Stigma yang berhubungan dengan ras, kebangsaan, dan agama

Paparan dari Erving Goffman tentang tipe-tipe stigma tersebut dapat menggambarkan keterkaitan antara kedisabilitas dengan stigma, sebab dua dari tiga jenis stigma tersebut sangat erat dengan kedisabilitas. Menurut Goffman, Stigma yang berhubungan dengan kecacatan fisik, ras, kebangsaan, dan agama merupakan stigma yang terlihat atau *visible*, sementara orang yang mempunyai stigma *visible* tersebut tergolong sebagai *the discredited* atau orang yang direndahkan. Stigma yang berhubungan dengan kecacatan pada mental atau karakter seseorang merupakan stigma yang dapat disembunyikan atau *concealable*, sementara orang yang memiliki stigma yang dapat disembunyikan tersebut tergolong sebagai *the discreditable* atau orang yang berpotensi untuk didiskreditkan.

Goffman menyebutkan bahwa mereka yang terstigmatisasi seperti 'orang cebol, orang buta, orang cacat dan mantan pasien gangguan mental umumnya dipandang sebagai bukan manusia.⁴⁰ Atas asumsi ini, mereka yang terstigmatisasi menjadi sasaran diskriminasi dan penolakan sosial. Berasal dari praktik Yunani dalam menandai budak, penerapan stigma adalah masalah eksploitasi dan penindasan. Dalam konteks modern, Goffman menganggap eksploitasi dan penindasan itu terjadi dalam bentuk segregasi, kepasifan, dan pemberian status inferior kepada individu dan kelompok yang distigmatisasi termasuk orang-orang disabilitas didalamnya sebagai bentuk diskriminasi.

⁴⁰ Colin Barnes & Mike Oliver, 1993. *Disability: A Sociological Phenomenon Ignored by Sociologists*, (West Yorkshire: University of Leeds)

I.6.4 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang sudah dirintis kementerian sosial sejak tahun 1983 adalah: Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE). Program Pemberdayaan FM ini didasarkan pada pendekatan “Pembangunan Bertumpu Pada Kelompok” (*community based development approach*).⁴¹ Puji Hadiyanti mengutip pendapat Freidmean bahwa proses wujud perubahan sosial atau status hirarkhi yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, akan meningkatkan kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.⁴²

KUBE ini dibentuk dengan harapan agar para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdapat di Indonesia dapat tereliminir sedikit demi sedikit. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulasi dan pendampingan. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.⁴³

⁴¹ Haryati Roebyantho, dkk, 2011. *Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui Kube*, (Jakarta: P3KS Press), hlm. 48.

⁴² *Ibid*, hlm. 40.

⁴³ Hendra Wijayanto, *loc.cit.* hlm. 150.

Tujuan Kelompok Usaha Bersama Ekonomis (KUBE) adalah: Meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan: meningkatnya pendapatan keluarga; meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan ;Meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya;Meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.⁴⁴

I.6.5 Dampak Sosial-Ekonomi

Secara sederhana dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat dari suatu kegiatan atau kejadian. Menurut Scott dan Mitchell dampak merupakan suatu transaksi sosial dimana seorang atau kelompok orang digerakkan oleh seseorang atau kelompok orang yang lainnya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan.⁴⁵ Dalam hal ini, aktivitas sosial ekonomi yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tunadaksa yang tergabung dalam Kubependa tentu akan berpengaruh atau berdampak pada kehidupan sosial maupun ekonomi mereka.

Menurut Enda, sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Sedangkan menurut Daryanto, sosial merupakan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Namun jika di lihat dari asal katanya, sosial berasal dari kata "socius" yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan

⁴⁴ Haryati Roebyantho, dkk, *op. cit.*, hlm. 48.

⁴⁵ Bambang Tri Kurnianto, 2017. *Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung*, (Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita), hlm. 7-8.

berkembang dalam kehidupan secara bersama-sama.⁴⁶ Sementara itu, kata ekonomi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “oikos” yang berarti keluarga dan “nomos” yang berarti peraturan atau hukum. Ekonomi erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup individu dan tingkat kemakmuran seseorang. Aspek-aspek yang mendukung kearah pemenuhan kebutuhan tersebut tergolong dalam unsur indikator penentuan tingkatan ekonomi seseorang di dalam masyarakat.⁴⁷

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan tiga indikator untuk mengukur dampak sosial, yaitu proses asosiatif antara sesama penyandang disabilitas maupun dengan masyarakat, menguatnya modal sosial kaum disabilitas, dan meringankan stigma penyandang disabilitas. Proses asosiatif adalah sebuah proses yang terjadi saling pengertian dan kerjasama timbal balik antara orang per orang atau kelompok satu dengan lainnya, dimana proses ini menghasilkan pencapaian tujuan-tujuan bersama.⁴⁸ Salah satu bentuk dari proses asosiatif ini adalah kerjasama. Kerjasama (*cooperation*) adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.⁴⁹

Modal sosial didefinisikan sebagai norma-norma dan jaringan-jaringan yang memungkinkan orang untuk bertindak secara kolektif, menyediakan kerangka referensi yang umum untuk melakukan percakapan tentang isu-isu

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 8.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 10.

⁴⁸ Burhan Bungin, 2006. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana) hlm. 58.

⁴⁹ *Ibid*. hlm. 59.

penting.⁵⁰ Dalam hal ini modal sosial dapat memunculkan aksi kolektif dalam memecahkan masalah dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat komponen dari modal sosial yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan sosial.

Stigma menurut Erving Goffman adalah istilah yang secara tradisional digunakan untuk merujuk pada tanda atau cacat yang menunjukkan 'inferioritas moral' yang mengharuskan penghindaran oleh seluruh masyarakat.⁵¹ Stigma merupakan cara mendefinisikan seseorang berdasarkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki seseorang yang bersifat merendahkan. Sementara untuk mengukur dampak ekonomi, penulis menggunakan dua indikator yaitu peningkatan pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

I.7 Metodologi Penelitian

I.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data cara induktif mulai dari tema-tema yang

⁵⁰ Michael Edwards, 2011. *The Oxford Handbook of Civil Society*, (New York: Oxford University Press), hlm. 198.

⁵¹ Colin Barnes & Mike Oliver, *loc. cit.*

khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.⁵² Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan agar dapat mendeskripsikan dan menggali informasi yang mendalam mengenai bentuk aktivitas sosial ekonomi yang dilakukan di Kubependa, faktor pendukung dan kendala yang dihadapi, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas sosial ekonomi di Kubependa.

I.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas yang berlokasi di Kampung Bojong Menteng, Gang AC Lengkeng, RT 01/RW 02, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2019 hingga Agustus 2019. Pengumpulan data dilakukan di lokasi dengan menyesuaikan pada aktivitas di Kubependa.

I.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mereka yang dianggap mampu untuk menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan aktivitas sosial ekonomi penyandang disabilitas di Kubependa, faktor pendukung dan kendala yang dihadapi, serta dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Informan kunci yang penulis pilih adalah tiga orang responden penyandang disabilitas tunadaksa yaitu ketua dan pengurus Kubependa. Selain itu penulis juga akan melakukan wawancara dengan empat anggota Kubependa yang juga merupakan penyandang disabilitas tunadaksa.

⁵² John W. Creswell, 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hlm. 4-5.

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara untuk menggali informasi secara mendalam dari berbagai narasumber yang penulis anggap kompeten. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data primer terkait dengan penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terhadap tujuh orang dari pihak Kubependa. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan dilakukan dengan mengacu pada pedoman wawancara yang sudah penulis buat sebelumnya.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap subyek penelitian untuk mengambil data di lokasi penelitian yaitu Kubependa.

c. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Selama proses penelitian, penulis juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (buku harian, diari, surat, *e-mail*).⁵³ Sementara itu, studi pustaka penulis lakukan dengan membaca berbagai jurnal, dan buku yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

⁵³ John W. Creswell, *op. cit.*, hlm. 255.

I.7.5 Teknik Analisis Data

a. Triangulasi Data

Penulis melakukan triangulasi data dalam rangka melakukan validasi data. Hal ini penulis lakukan untuk mengecek keabsahan data penelitian yang dihasilkan dari hasil pengamatan dan observasi. Dalam hal ini penulis melakukan triangulasi data kepada dua tokoh masyarakat di lingkungan Kubependa, yaitu Ibu Lina Suryani yang merupakan ketua RT 01, dan Bapak Darus yang merupakan ketua RW 02 Kampung Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Bekasi.

I.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu; satu bab pendahuluan, dua bab uraian empiris, satu bab analisis, dan satu bab kesimpulan.

BAB I; Pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II; Konteks Sosio-Historis Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas (Kubependa) di Bekasi, bab ini menjelaskan gambaran umum organisasi, sejarah pembentukan, struktur kepengurusan, lokasi Kubependa, visi dan misi, fungsi dan tujuan, sarana dan prasarana serta kondisi dari para penyandang disabilitas didalamnya.

BAB III; Penulis memfokuskan penelitian pada pelaksanaan aktivitas sosial ekonomi penyandang disabilitas tunadaksa di Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas (Kubependa) Bekasi. Peneliti akan menjelaskan aktivitas

sosial ekonomi apa saja yang dilakukan di Kubependa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas para penyandang disabilitas. **BAB IV**; pada bab ini penulis menganalisis hasil temuan-temuan lapangan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dengan menggunakan konsep aktivitas sosial ekonomi dan stigma. **BAB V**; berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis mengenai aktivitas sosial ekonomi penyandang disabilitas tunadaksa di Kubependa.